 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL		1721-B1
	H.1	NOMOR : 2000000567	H.4 <input checked="" type="checkbox"/> Final
	H.2	<input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.5 <input type="checkbox"/> Tidak Final

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 NPWP :	815512470722000
A.2 NIK :	
A.3 Nama :	ALPIANSYAH

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
1	21-402-01	5.072.600	5.072.600	0	5	253.630

Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota


B.8 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	138				
	Nama Dokumen	Faktur Pajak	Tanggal	25dd	02mm	2022yyyy

B.9 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.				
Nomor :	Tanggal	<td><td></td></td>	<td></td>	

B.10 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :	
---	--

B.11 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :	
---	--

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP Instansi Pemerintah :	953350162722000
C.2 Nama Instansi Pemerintah :	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
C.3 ID Subunit Organisasi :	
C.4 Tanggal :	26dd01mm2022yyyy
C.5 Nama Penandatanganan :	HARI JUMADI
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.
<div> ECE5EF3I</div> <div>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.</div>	